


## PERAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Delia Torsa Purba<sup>1</sup>, Wafiyah Ningrum<sup>2</sup>, Aryadanu Dalimunte<sup>3</sup>, Misagi Mukhti Ginting<sup>4</sup>,  
Reni Ria Armayani Hasibuan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan

e-mail : [deliatorsa575@gmail.com](mailto:deliatorsa575@gmail.com)<sup>1</sup>, [wafianingrum08@gmail.com](mailto:wafianingrum08@gmail.com)<sup>2</sup>, [aryadanuu20188@gmail.com](mailto:aryadanuu20188@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[misagimukhtiginting@gmail.com](mailto:misagimukhtiginting@gmail.com)<sup>4</sup>, [reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

<p><b>Menerima:</b> 20/12/2025</p> <p><b>Diterima:</b> 21/12/2025</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 22/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p>	<p><b>Abstrak</b> <i>This study explores the contribution of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to Indonesia's economic development by analyzing their role in GDP, employment absorption, regional business distribution, access to financing, and integration into global value chains. Employing a descriptive qualitative approach through literature review, this research utilizes national journals, government reports, and official statistical data. The findings reveal that MSMEs play a significant role in the national economy, contributing 61% to GDP and 97% to employment absorption. However, MSMEs continue to face several challenges, including limited capital, low levels of digitalization, insufficient human resource quality, and infrastructure disparities. Although MSME participation in export activities has increased, further integration into the Global Value Chain (GVC) and utilization of Global E-Commerce (GEC) are required. This study recommends capacity enhancement, digital transformation, expanded access to financing, and the development of a supportive business ecosystem to maximize the contribution of MSMEs to inclusive and sustainable national economic growth.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs), Economic Development, Employment Absorption.</i></p>
---	--

### PENDAHULUAN

Dalam dinamika ekonomi Indonesia, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin memegang peran strategis sebagai landasan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaku UMKM telah lama berfungsi sebagai aktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan industri berskala besar. Berbagai kajian menunjukkan konsistensi temuan terkait dominasi UMKM dalam struktur ekonomi nasional. Wati et al. (2024) menyatakan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 99 persen terhadap total unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional, sehingga eksistensinya tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi komponen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi, UMKM juga berperan penting dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Lubis dan Salsabila (2024) menegaskan bahwa UMKM berkontribusi pada penguatan inklusi ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Aktivitas ekonomi berbasis komunitas ini mampu memperluas peluang usaha dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif, sehingga UMKM tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memfasilitasi pemerataan kesejahteraan.

Keunggulan lainnya dari UMKM terlihat dari resiliensinya dalam menghadapi tekanan ekonomi baik nasional maupun global. Penelitian Ismail et al. (2023) menunjukkan bahwa

UMKM memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, yang tercermin dari kemampuan adaptasi yang fleksibel, kebutuhan modal yang relatif rendah, serta struktur operasional yang sederhana. Pada periode perlambatan ekonomi, UMKM terbukti mampu bertahan dan mempertahankan operasinya, sementara sebagian besar perusahaan berskala besar mengalami penurunan. Ketahanan ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM merupakan strategi penting untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, kontribusi signifikan UMKM terhadap ekonomi nasional belum sepenuhnya seimbang dengan kondisi internal sektor tersebut. UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan fundamental yang menghambat optimalisasi perannya. Masalah terkait akses pembiayaan, kapasitas manajerial, pemanfaatan teknologi digital, inovasi produk, serta keterbatasan akses pasar menjadi faktor yang secara nyata membatasi ruang gerak UMKM untuk berkembang lebih lanjut. Tantangan ini diperkuat oleh ketidaksesuaian temuan penelitian sebelumnya mengenai faktor yang paling dominan memengaruhi kinerja UMKM. Beberapa kajian menempatkan permodalan sebagai kendala utama, sementara yang lain menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, legalitas usaha, dan kemampuan digital. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan riset yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Kesenjangan lainnya terlihat dalam ranah empiris, khususnya terkait disparitas antara kontribusi besar UMKM terhadap ekonomi dengan dukungan kebijakan yang diterima. Data nasional menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 % tenaga kerja nasional. Namun, proporsi akses kredit UMKM masih di bawah 20 % dari total kredit perbankan nasional, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan signifikan antara kontribusi dan dukungan struktural yang diterima. Disparitas ini menggambarkan adanya kesenjangan kebijakan yang perlu diatasi melalui strategi penguatan UMKM yang lebih terarah.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian mengenai peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional, mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi kinerja UMKM, serta merumuskan strategi penguatan sektor UMKM agar dapat berkontribusi optimal dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai UMKM dan memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika sektor usaha kecil dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pemerintah dan strategi pengembangan oleh pelaku UMKM, lembaga keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya.

## TINJAUAN TEORITIS

### Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyediakan kerangka hukum yang jelas terkait definisi, kategorisasi, dan ciri-ciri ketiga jenis usaha tersebut. Usaha Mikro didefinisikan sebagai kegiatan produktif milik individu atau entitas perorangan yang memenuhi kriteria regulasi. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang mandiri, tanpa afiliasi dengan usaha menengah atau besar. Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang juga mandiri, dengan kekayaan bersih atau omset sesuai batasan (Haryani, 2022). Undang-undang ini menegaskan posisi UMKM dalam ekonomi nasional, memfasilitasi dukungan pemerintah berdasarkan karakteristiknya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, Usaha Kecil (5-19 orang) dan Usaha Menengah (20-99 orang). Kementerian Koperasi dan UMKM menetapkan batasan berdasarkan kekayaan bersih dan omset: Usaha Kecil (maksimal Rp200 juta kekayaan bersih dan Rp1 miliar omset tahunan), Usaha Menengah (Rp200 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan). Bank Indonesia menekankan bahwa Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang mandiri dan memiliki aset tetap sesuai ketentuan (Johan, 2020). Perbedaan ini memungkinkan kategorisasi dari aspek aset, omset, dan tenaga kerja, memudahkan intervensi kebijakan.

Berdasarkan analisis konseptual, indikator UMKM meliputi skala usaha yang mencakup jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi, dan cakupan pasar; aset dan omset yang meliputi kekayaan bersih, modal, dan pendapatan tahunan; struktur kepemilikan yang menekankan usaha mandiri tanpa afiliasi perusahaan besar; produktivitas yang mencakup nilai tambah, volume produksi, dan efisiensi operasional; legalitas yang meliputi izin usaha, sertifikasi, dan kepatuhan regulasi; akses pembiayaan yang mencakup kemampuan memperoleh kredit atau alternatif; serta inovasi dan digitalisasi yang mencakup pemanfaatan teknologi, pemasaran digital, dan inovasi produk.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama kinerja pembangunan negara, didefinisikan sebagai peningkatan output riil atau pendapatan nasional riil secara berkelanjutan. Sukirno (2007) menjelaskan bahwa hal ini mencerminkan kapasitas negara dalam menghasilkan barang dan jasa melalui akumulasi modal, peningkatan sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ini bukan pencapaian sementara, melainkan proses jangka panjang yang meningkatkan output per kapita dan kesejahteraan, dengan pemerataan pendapatan sebagai aspek krusial untuk menghindari ketimpangan sosial.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator utama, mencerminkan nilai total output barang dan jasa akhir dalam periode tertentu. Naila dan Abubakar (2024) menyatakan PDB memberikan gambaran komprehensif ekonomi melalui perhitungan pendapatan dan pengeluaran nasional, memungkinkan perumusan kebijakan fiskal dan moneter.

Teori neoklasik Solow menjelaskan hubungan pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan teknologi terhadap output ekonomi. Model ini menekankan peran teknologi sebagai faktor fundamental jangka panjang, karena akumulasi modal dan tenaga kerja terbatas dan mengalami diminishing returns (Safina et al., 2024). Inovasi dan produktivitas menjadi elemen penting untuk pertumbuhan berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis melalui sumber-sumber ilmiah tanpa melakukan pengujian lapangan. Mengacu pada Sugiyono (2023), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena secara mendalam dengan memanfaatkan data yang bersifat alamiah, termasuk dokumen tertulis, laporan, dan publikasi ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah jurnal nasional, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi akademik yang relevan mengenai UMKM dan pembangunan ekonomi. Proses ini meliputi identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur untuk memastikan bahwa data yang digunakan kredibel dan sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten. Sesuai pandangan Sugiyono (2023), analisis konten mencakup kegiatan membaca, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data untuk menemukan tema, pola, serta hubungan antarvariabel. Melalui teknik ini, peneliti dapat menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menarik kesimpulan secara objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Profil UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kontribusi mencapai 99% dari total unit usaha, UMKM menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi nasional.

Tabel. 1. Data Jumlah UMKM di Indonesia 2024

Kategori UMKM	Jumlah	Presentase
UMKM Non Pertanian dan Perikanan	30.178.617	50,7%
UMKM Perikanan dan Perikanan	29.341.033	49,3%
Total	59.519.650	

Sumber: UMKM Indonesia – KADIN Indonesia (2025)

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tahun 2024, struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu UMKM Non-Pertanian/Perikanan dan UMKM yang beroperasi di bidang Pertanian serta Perikanan. Jumlah total UMKM nasional tercatat sebanyak 59.519.650 unit usaha, dengan distribusi yang relatif seimbang di antara kedua sektor tersebut. Kategori UMKM Non-Pertanian dan Perikanan mendominasi dengan 30.178.617 unit usaha, atau 50,7% dari keseluruhan UMKM, yang menunjukkan bahwa separuh dari unit usaha UMKM di Indonesia terlibat dalam sektor perdagangan umum, jasa, kuliner, industri rumah tangga, serta manufaktur sederhana yang berkaitan langsung dengan konsumsi domestik dan aktivitas perdagangan harian.

Dominasi UMKM Non-Pertanian dan Perikanan mencerminkan transformasi struktur UMKM Indonesia menuju kegiatan ekonomi modern yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam, melainkan pada inovasi, kreativitas, dan pengembangan pasar. Basis usaha ini umumnya berkembang di wilayah perkotaan atau daerah dengan akses digital dan jaringan pemasaran yang memadai, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam skala makro.

Sebaliknya, kategori UMKM Pertanian dan Perikanan masih menyumbang porsi substansial dengan 29.341.033 unit usaha, atau 49,3% dari total UMKM. Komposisi yang hampir setara ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi berbasis agraris tetap menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan nasional, tetapi juga sebagai penyangga utama pendapatan di daerah pedesaan. Keterlibatan UMKM dalam pertanian dan perikanan menegaskan bahwa proses produksi tradisional dan sumber daya lokal masih menjadi fondasi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah non-perkotaan.

Melalui distribusi ini, terlihat bahwa struktur UMKM Indonesia didasarkan pada keseimbangan ekonomi antara sektor primer dan non-primer. UMKM tidak hanya fokus pada usaha konsumtif atau perdagangan umum, tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam melalui pertanian dan perikanan. Keseimbangan ini mencerminkan karakter UMKM Indonesia sebagai sektor ekonomi yang inklusif, mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, menjangkau wilayah pedesaan dan perkotaan, serta berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan komposisi yang hampir merata, pengembangan UMKM perlu diarahkan pada dua strategi fokus yang berbeda. UMKM sektor Non-Pertanian dan Perikanan harus diperkuat melalui digitalisasi, inovasi produk, peningkatan pemasaran, dan pengembangan jejaring usaha. Sementara itu, UMKM sektor Pertanian dan Perikanan memerlukan dukungan berupa akses alat produksi, teknologi pertanian modern, pembiayaan usaha mikro, serta peningkatan kualitas hasil yang dapat diserap oleh pasar industri.

#### 4.1.2 Persebaran UMKM Berdasarkan Provinsi

Tabel.2. Jumlah UMKM Di Indonesia Sepanjang 2024

38 Provinsi	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit)	
	Mikro	Kecil
	2024	2024
ACEH	106147	2360
SUMATERA UTARA	116906	7005
SUMATERA BARAT	85194	2859
RIAU	52839	1586
JAMBI	29576	1692
SUMATERA SELATAN	73955	3723
BENGGULU	20744	911
LAMPUNG	83989	4080
KEP. BANGKA BELITUNG	17138	583
KEP. RIAU	20113	331
DKI JAKARTA	59908	11142
JAWA BARAT	583357	56959
JAWA TENGAH	834615	52944
DI YOGYAKARTA	119560	5555
JAWA TIMUR	824473	101512
BANTEN	93834	5892
BALI	143770	3273
NUSA TENGGARA BARAT	103807	14854

NUSA TENGGARA TIMUR	144145	1148
KALIMANTAN BARAT	46213	596
KALIMANTAN TENGAH	29032	628
KALIMANTAN SELATAN	58754	2195
KALIMANTAN TIMUR	31440	2111
KALIMANTAN UTARA	5783	170
SULAWESI UTARA	47990	911
SULAWESI TENGAH	73087	9267
SULAWESI SELATAN	122892	3911
SULAWESI TENGGARA	48432	1065
GORONTALO	29423	1482
SULAWESI BARAT	24363	375
MALUKU	41326	2169
MALUKU UTARA	13380	2407
PAPUA BARAT	1827	31
PAPUA BARAT DAYA	2822	39
PAPUA	7370	129
PAPUA SELATAN	4911	20
PAPUA TENGAH	3732	96
PAPUA PEGUNUNGAN	552	35
INDONESIA	4107397	306046

*Sumber: BPS 2025*

Persebaran Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan adanya disparitas kapasitas ekonomi yang signifikan antarwilayah, khususnya antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan provinsi di luar Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, provinsi dengan jumlah usaha mikro dan kecil terbesar didominasi oleh wilayah yang memiliki pangsa ekonomi substansial serta infrastruktur yang lebih berkembang.

Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi terdepan sebagai wilayah dengan jumlah usaha mikro terbanyak, yakni sebanyak 834.615 unit mikro dan 52.944 unit usaha kecil. Konsentrasi usaha yang tinggi ini mengindikasikan potensi kuat di sektor industri rumah tangga, kerajinan, produksi pangan, dan perdagangan skala kecil. Selain itu, volume unit usaha ini berkorelasi dengan populasi penduduk yang besar serta karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang memiliki keterikatan kuat dengan budaya kewirausahaan.

Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan 824.473 unit usaha mikro dan 101.512 unit kecil, sehingga menjadi wilayah dengan total usaha kecil terbanyak secara nasional. Populasi usaha yang besar ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tinggi berbasis produksi dan perdagangan. Selain berfungsi sebagai pusat pengembangan industri mikro di Indonesia bagian timur, Jawa Timur juga memiliki jaringan pasar yang ekstensif, yang mendukung keberlanjutan usaha kecil di kalangan masyarakat.

Provinsi Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan 583.357 unit usaha mikro dan 56.959 usaha kecil. Kombinasi populasi yang besar, tingkat urbanisasi yang tinggi, serta keberadaan kawasan industri dan pusat perdagangan menjadikan provinsi ini sebagai salah satu episentrum

pertumbuhan UMKM nasional. Infrastruktur yang memadai, akses terhadap teknologi digital, dan ketersediaan sumber daya manusia mendukung produktivitas pelaku usaha di wilayah tersebut.

Berbeda dengan kondisi di atas, provinsi di kawasan timur Indonesia mencatat jumlah UMKM yang relatif rendah. Papua Pegunungan merupakan provinsi dengan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil terendah, yaitu 552 unit mikro dan 35 unit kecil. Papua Selatan dan Papua Barat Daya juga menunjukkan angka usaha yang jauh lebih rendah dibandingkan provinsi di wilayah barat Indonesia. Rendahnya jumlah ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur ekonomi, kondisi geografis yang sulit diakses, serta minimnya akses terhadap pasar dan pembiayaan formal.

Selain Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua juga menampilkan angka UMKM yang rendah. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan ekonomi dan akses usaha antarwilayah yang belum merata. Di sisi lain, provinsi-provinsi di Sulawesi dan Kalimantan menunjukkan jumlah UMKM yang moderat, seperti Sulawesi Selatan dengan 122.892 usaha mikro dan 3.911 usaha kecil, serta Kalimantan Selatan dengan 58.754 usaha mikro dan 2.195 usaha kecil.

Secara keseluruhan, pola persebaran usaha mikro dan kecil di Indonesia pada tahun 2024 masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa, yang didukung oleh kapasitas ekonomi yang lebih kuat, ketersediaan infrastruktur, akses logistik, serta kemajuan digitalisasi. Sementara itu, provinsi di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia, masih menghadapi tantangan struktural yang memengaruhi pertumbuhan dan pemerataan UMKM. Kondisi ini menekankan perlunya intervensi pemerintah melalui peningkatan infrastruktur, penyediaan akses permodalan, serta program pendampingan usaha guna memastikan UMKM dapat berkembang secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

### Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2024

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2024 memainkan peran fundamental dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia tahun 2025, total UMKM di Indonesia mencapai 59.519.650 unit usaha, yang terdiri dari UMKM Non-Pertanian dan Perikanan sebanyak 30.178.617 unit (50,7%) serta UMKM di sektor Pertanian dan Perikanan sebanyak 29.341.033 unit (49,3%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa struktur UMKM nasional tetap seimbang antara sektor primer yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan sektor non-primer yang mendukung aktivitas perdagangan serta jasa modern.

Selain aspek sektoralnya, persebaran UMKM pada tahun 2024 juga menunjukkan pola ketimpangan spasial antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil tersebar di 38 provinsi dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah dengan unit usaha mikro terbanyak, yakni 834.615 unit, diikuti oleh Jawa Timur (824.473 unit) dan Jawa Barat (583.357 unit). Temuan ini mengungkapkan bahwa kawasan Jawa masih menjadi episentrum pertumbuhan UMKM nasional, sejalan dengan akses pasar yang tinggi, infrastruktur industri yang berkembang, serta keterhubungan logistik yang memadai di wilayah tersebut.

Sebaliknya, wilayah timur Indonesia memiliki jumlah UMKM yang relatif rendah. Papua Pegunungan, misalnya, hanya memiliki 552 unit usaha mikro dan 35 unit usaha kecil, yang mencerminkan keterbatasan akses infrastruktur dan pasar yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di kawasan timur menghadapi hambatan struktural dalam

pengembangan usaha, khususnya terkait pembiayaan, mobilitas produksi, dan pemanfaatan teknologi.

Temuan dari kedua sumber data tersebut menegaskan bahwa tahun 2024 merupakan fase di mana UMKM berada pada posisi strategis untuk mendukung perekonomian nasional. Selain menyerap tenaga kerja dalam skala besar, UMKM berkontribusi terhadap penguatan pasar domestik, penggerak sektor riil, pemerataan ekonomi wilayah, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Secara keseluruhan, struktur dan persebaran UMKM pada tahun 2024 menunjukkan fondasi ekonomi yang kuat, meskipun tantangan pemerataan antarwilayah tetap menjadi agenda utama dalam pengembangan UMKM ke depan.

### **Akses Permodalan dan Perkembangan Kredit UMKM**

Akses permodalan merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pada tahun 2024, pemerintah dan lembaga keuangan semakin memperkuat dukungan terhadap pembiayaan UMKM melalui berbagai program kredit dan kebijakan pembiayaan produktif. Kondisi ini tercermin dari peningkatan penyerapan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit UMKM dari bank umum, serta pembiayaan berbasis lembaga non-bank.

Data nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran KUR mencapai nilai yang signifikan, khususnya kepada sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, dan usaha mikro skala lokal. Penyaluran kredit tersebut mengindikasikan peningkatan permintaan modal di sektor UMKM sebagai akibat dari ekspansi pasar, pertumbuhan aktivitas perdagangan, serta kebutuhan pembiayaan operasional usaha. Selain itu, tren kenaikan penyerapan kredit UMKM pada tahun tersebut dipengaruhi oleh iklim suku bunga yang stabil, kemudahan prosedur pengajuan kredit, digitalisasi perbankan, serta penetrasi layanan keuangan ke wilayah sub-urban dan pedesaan.

Akses pembiayaan UMKM pada tahun 2024 juga menunjukkan perubahan pola konsumsi kredit. Jika sebelumnya sebagian besar pembiayaan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, pada tahun ini semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan kredit untuk modal pengembangan usaha, investasi alat produksi, ekspansi usaha, dan pemasaran digital. Kemajuan ini didukung oleh proliferasi platform teknologi finansial (fintech) yang menyediakan pembiayaan mikro dengan skema yang sederhana, cepat, serta berbiaya relatif rendah.

Meskipun tren penyaluran kredit menunjukkan peningkatan, tantangan akses permodalan masih dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM, terutama usaha mikro non-formal dan UMKM di wilayah pedesaan luar Jawa. Pelaku usaha masih menghadapi kendala seperti keterbatasan agunan, minimnya literasi keuangan, serta ketidakmerataan kemampuan manajerial dalam pengelolaan pinjaman. Kondisi tersebut berimplikasi pada kesenjangan kinerja kredit UMKM antarwilayah, di mana provinsi di Pulau Jawa mencatat tingkat pengajuan kredit yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah timur Indonesia.

Dengan meningkatnya peran kredit dalam mendukung pertumbuhan UMKM pada tahun 2024, sektor ini menunjukkan kapasitas untuk terus memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, efektivitas pembiayaan akan sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas manajemen keuangan pelaku usaha, serta penguatan lembaga penjamin kredit untuk mendorong UMKM yang belum bankable agar dapat terintegrasi ke dalam sistem pembiayaan formal.

### **Keterlibatan UMKM dalam Ekspor dan Rantai Pasok Global**

Keterlibatan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia dalam kegiatan ekspor serta rantai pasok global telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi, akses terhadap teknologi, dan ekspansi jaringan pemasaran yang lebih terbuka. Pada tahun 2024, UMKM semakin terintegrasi ke dalam pasar internasional melalui berbagai mekanisme ekspor langsung, kemitraan domestik, serta konektivitas dalam rantai pasok perusahaan multinasional. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional pada skala global.

Sektor UMKM yang aktif menembus pasar ekspor pada tahun 2024 didominasi oleh produk makanan olahan, kerajinan tangan, tekstil, perikanan, komoditas pertanian, serta produk kreatif. Banyak pelaku UMKM berhasil memasuki pasar regional seperti Asia Timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah dengan memanfaatkan platform digital ekspor, marketplace internasional, serta pameran perdagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemajuan ini tidak terpisahkan dari kebijakan fasilitasi ekspor yang diperkuat melalui pendampingan dalam kemasan, sertifikasi halal, standar kualitas produk, serta pelatihan ekspor digital bagi pelaku usaha lokal.

Selain ekspor langsung, posisi UMKM dalam rantai pasok global semakin diperkuat melalui model kemitraan dengan perusahaan berskala besar. UMKM yang beroperasi di sektor industri kreatif, logistik mikro, makanan, serta manufaktur rumah tangga berperan sebagai pemasok komponen, bahan baku, dan produk semi-jadi bagi industri besar yang berorientasi ekspor. Konektivitas ini memperluas fungsi UMKM dalam mendukung industrialisasi nasional, sekaligus membuka peluang bagi usaha mikro untuk memperoleh transfer teknologi, peningkatan kualitas produk, dan jaminan keberlanjutan pasar.

Meskipun terdapat kemajuan yang substansial, tantangan tetap muncul dalam ekspansi ekspor UMKM. Masalah umum meliputi keterbatasan dalam kemampuan sertifikasi produk, standar mutu internasional, literasi digital, permodalan ekspor, serta biaya logistik yang relatif tinggi. Selain itu, sebagian besar UMKM yang berorientasi ekspor masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah di luar Jawa menghadapi hambatan infrastruktur dan akses pasar internasional yang belum merata. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan dukungan terhadap UMKM di sektor ekspor melalui kebijakan integrasi pasar, simplifikasi regulasi perdagangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan pelaku industri.

Secara keseluruhan, keterlibatan UMKM dalam ekspor dan rantai pasok global pada tahun 2024 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perdagangan nasional. Partisipasi UMKM di pasar internasional tidak hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri Indonesia, serta mempercepat proses transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih modern, inovatif, dan berbasis teknologi.

### **Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2024, sektor UMKM tercatat menyumbang sekitar 61 persen terhadap total PDB nasional, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan salah satu penggerak utama dalam penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi yang signifikan ini tidak terpisahkan dari jumlah pelaku UMKM yang

mencapai lebih dari 60 juta unit usaha aktif, yang tersebar di berbagai sektor produktif seperti perdagangan, kuliner, industri olahan, pertanian, serta usaha berbasis jasa dan kreativitas.

Posisi UMKM sebagai kontributor dominan terhadap PDB mengindikasikan bahwa sektor ini mampu mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat mikro hingga makro. UMKM berfungsi sebagai titik penggerak rantai ekonomi melalui konsumsi domestik, peningkatan aktivitas pasar lokal, produksi barang dan jasa, serta perputaran ekonomi daerah. Komponen nilai tambah yang dihasilkan oleh UMKM berasal dari berbagai proses ekonomi, termasuk distribusi, produksi rumah tangga, kegiatan perdagangan, dan produksi barang setengah jadi yang mendukung industri berskala besar.

Selain itu, kapasitas UMKM dalam menyerap tenaga kerja memiliki implikasi langsung terhadap pertumbuhan PDB. Dengan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional pada tahun 2024, UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperluas basis konsumsi nasional, yang pada akhirnya memperkuat permintaan agregat. Kombinasi antara produksi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja menjadikan UMKM sebagai pilar utama yang merangsang ekspansi ekonomi nasional.

Secara struktural, kontribusi UMKM terhadap PDB juga menunjukkan peran strategis sektor ini dalam menjaga ketahanan ekonomi. UMKM terbukti mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global, seperti selama krisis pandemi, di mana banyak perusahaan berskala besar mengalami perlambatan aktivitas usaha. Kemampuan adaptasi yang tinggi, model bisnis yang fleksibel, kebutuhan modal yang relatif rendah, serta basis usaha yang tersebar luas memungkinkan sektor ini berperan sebagai stabilisator ekonomi nasional.

Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap PDB masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas produksi, hambatan digitalisasi, dan keterbatasan akses pasar tetap menjadi kendala utama dalam peningkatan nilai tambah sektor ini. Oleh karena itu, penguatan struktur pendukung UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan manajemen, transformasi digital, sertifikasi produk, dan pengembangan kapasitas ekspor menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB dalam jangka panjang.

## PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya ketika dianalisis dari perspektif makroekonomi nasional. Sebagai fondasi utama perekonomian rakyat, UMKM tidak hanya memberikan kontribusi yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memainkan fungsi stabilisasi ekonomi ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal maupun internal. Dalam analisis makro, UMKM terbukti mendukung penguatan ekonomi nasional melalui penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan ekspansi basis konsumsi domestik yang berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Sembiring (2024) yang menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang memegang peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, terutama pada saat sektor industri berskala besar menunjukkan perlambatan akibat dinamika ekonomi global.

Secara umum, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor UMKM, dengan kontribusi sektor ini terhadap PDB mencapai sekitar 61 persen dan penyerapan 97 persen tenaga kerja nasional. Kontribusi yang signifikan terhadap PDB menunjukkan bahwa sektor UMKM menjadi pilar utama dalam pembentukan pendapatan nasional dan nilai tambah ekonomi melalui aktivitas perdagangan, kuliner, industri rumah tangga, agribisnis, dan jasa kreatif. Di sisi lain,

kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa UMKM juga memiliki fungsi sosial sebagai instrumen pemerataan pembangunan, karena mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak dapat terserap di sektor industri formal. Dengan basis usaha yang tersebar luas di seluruh provinsi, UMKM berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal dan memastikan pelaksanaan pembangunan ekonomi secara merata hingga ke daerah terpencil.

Peran UMKM dalam konteks pemberdayaan sosial-ekonomi juga sangat kuat. Harahap (2023) menekankan bahwa UMKM berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, di mana pelaku usaha mikro mampu menggerakkan potensi lokal melalui pemanfaatan sumber daya, budaya, dan tradisi daerah untuk menciptakan pendapatan mandiri. Di wilayah pedesaan, UMKM memberikan kontribusi penting dalam menekan tingkat urbanisasi, menciptakan kemandirian pangan, dan memperkuat hubungan ekonomi berbasis komunitas. Keberadaan UMKM menjadi penyangga struktur ekonomi rumah tangga karena menghasilkan pendapatan harian yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dampak sosial ini diperkuat oleh Prasetiyaningsih et al. (2025) yang menyatakan bahwa UMKM berbasis potensi lokal berperan menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan peluang kerja informal dan formal, sekaligus memperkuat inklusi keuangan masyarakat. Dengan demikian, UMKM memiliki fungsi ganda: fungsi produktif dalam menciptakan barang dan jasa serta fungsi transformasional dalam membangun kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif daya saing usaha, UMKM juga memainkan peran penting dalam pembentukan rantai nilai industri nasional. Struktur usaha kecil yang bergerak di sektor kuliner, tekstil, kerajinan, agroindustri, dan industri kreatif menjadi pemasok kebutuhan industri menengah dan besar, sehingga menciptakan keterhubungan antara usaha kecil dan rantai produksi nasional. Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari tantangan struktural yang masih signifikan. Simanjuntak (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan pelaku usaha yang masih rendah menghambat optimalisasi pengelolaan modal, arus kas, dan investasi usaha. Selain itu, keterbatasan keterampilan manajemen dan pemasaran menyebabkan banyak UMKM tidak dapat mengembangkan strategi bisnis jangka panjang. Masalah lain muncul dari rendahnya adopsi teknologi digital sehingga pelaku usaha sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Temuan Aftitah et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas inovasi dan digitalisasi merupakan syarat mutlak bagi UMKM agar mampu mempertahankan daya saing di tengah kompetisi usaha yang semakin ketat dan global.

Selain tantangan internal, sektor UMKM juga menghadapi hambatan struktural eksternal. Dari sudut pandang infrastruktur dan lingkungan bisnis, masih terdapat kesenjangan fasilitas publik antara wilayah Jawa dan wilayah luar Jawa. Hutabarat (2024) menyoroti bahwa akses internet, jaringan transportasi, fasilitas logistik, serta biaya produksi menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan UMKM di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur ini membuat biaya logistik lebih tinggi, akses pasar semakin terbatas, dan efektivitas distribusi barang menjadi rendah dibandingkan UMKM yang berlokasi di pusat-pusat industri Jawa. Hal ini berdampak pada kesenjangan produktivitas dan kinerja pemasaran antarwilayah. Dalam konteks ini, Fitri Nurul Aftitah et al. (2025) menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur fisik dan digital merupakan syarat vital untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai industri nasional dan global.

Dari perspektif kebijakan publik, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memperkuat struktur UMKM. Dukungan berupa kemudahan perizinan, digitalisasi layanan usaha, insentif perpajakan, akses pembiayaan KUR, dan pendampingan usaha turut memengaruhi

keberhasilan UMKM dalam meningkatkan kapasitas bisnisnya. Purba (2023) menegaskan bahwa program literasi digital, pelatihan manajemen, dan pendampingan produktivitas merupakan strategi kunci yang dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil. Tak hanya itu, Prasetiyaningsih et al. (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor swasta, dan komunitas bisnis akan memperkuat ekosistem UMKM sehingga pelaku usaha dapat mengakses teknologi, modal, pasar, dan pendampingan usaha berkelanjutan.

Jika ditinjau dari sudut pandang perdagangan internasional, UMKM memiliki potensi besar untuk masuk ke rantai pasok global. Produk tekstil, kerajinan, perikanan, makanan olahan, hingga produk kreatif mulai mampu bersaing di pasar internasional. Namun, rendahnya kapasitas produksi, standar mutu internasional, sertifikasi impor, stabilitas pasokan bahan baku, serta akses pembiayaan ekspor masih menjadi kendala. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing internasional UMKM memerlukan intervensi strategis dalam bentuk kebijakan ekspor berbasis digital, pelatihan ekspor, peningkatan kualitas produk, serta pembentukan klaster perdagangan berbasis komoditas.

Secara keseluruhan, pembahasan makro ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang. Melalui peran strukturalnya dalam PDB, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan stabilisasi konsumsi domestik, UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi Indonesia. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan strategi penguatan menyeluruh yang mencakup inovasi produk, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, integrasi pasar, penguatan infrastruktur logistik, serta pengembangan kapasitas ekspor. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, UMKM memiliki peluang besar untuk terus memperkuat struktur perekonomian Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing global secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia melalui kontribusinya yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga berfungsi sebagai katalis pemerataan ekonomi, karena mampu menjangkau wilayah-wilayah yang belum terakomodasi oleh industri berskala besar. Namun, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, infrastruktur yang lemah, defisiensi kemampuan pemasaran, serta rendahnya tingkat inovasi dan digitalisasi. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendukung, penguatan UMKM tetap memerlukan kolaborasi lintas sektor dan strategi berkelanjutan agar dapat meningkatkan daya saing serta kontribusi ekonomi nasional secara optimal.

## SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan analisis lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan dukungan UMKM, termasuk akses permodalan, program digitalisasi, dan pelatihan usaha. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor adopsi teknologi, evaluasi program pemberdayaan, serta studi perbandingan UMKM antarnegara atau antar sektor untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih terarah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Sari, A. Sitorus, A. T. Purba, and H. R. Putri, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia," vol. 02, no. 01, pp. 122–129, 2025.
- C. Batubara, "Peran UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," vol. 2, no. 4, pp. 1142–1150, 2024.
- C. Yolanda et al., "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia I," vol. 2, no. 3, pp. 170–186, 2024.
- E. Sirait, B. H. Sugiharto, J. Abidin, N. S. Padang, and J. Eka, "Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia," vol. 5, no. 7, pp. 3816–3829, 2024.
- F. N. Aftitah, J. L. K. K. Hasanah, N. Lailatul, U. Bina, and S. Informatika, "Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023 Pemerintah mendukung UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun penyalurannya tahun 2023 belum memenuhi target. UMKM kini terus," vol. 3, pp. 32–43, 2025.
- F. R. Meilantika, L. Sihotang, and F. V. Rachma, "Umkm Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia," vol. 2, pp. 188–193, 2024.
- J. E. Bisnis et al., "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia," vol. 2, no. 3, 2023.
- J. E. Bisnis, A. Jebmak, D. L. Wati, V. Septianingsih, W. Khoeruddin, and Z. Q. A.-Qorni, "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," vol. 3, no. 1, 2024.
- J. Ekonomi and M. Akuntansi, "Peran UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia," vol. 3, pp. 459–466, 2024.
- J. Neraca, J. Pendidikan, I. Ekonomi, and A. Volume, "Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia Oleh: Khafid Ismail 1, Miftakhur Rohmah 2\*, Diah Ayu Pratama Putri 3 (Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda)," vol. 7, pp. 208–217, 2023, doi: 10.31851/neraca.v7i2.14344.
- N. April, P. Salsabila, I. Lubis, and R. Salsabila, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," vol. 2, no. 3, 2024.
- P. Madiun, "Peran Koperasi dan UMKM dalam Mendorong Inovaasi Ekonomi di Indonesia," vol. 5, no. 2, pp. 85–89, 2025.
- Y. A. Hapsari, P. Apriyanti, A. Hermiyanto, and F. Rozi, "Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia," no. 4, 2024.